

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Mesir merupakan negara yang dipimpin oleh seorang Presiden otoriter selama 30 tahun, yaitu Hosni Mubarak. Mesir berada di bawah kekuasaan Hosni Mubarak sejak tahun 1981 hingga akhirnya mengundurkan diri pada 25 Februari 2011 akibat demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Mesir menuntut transisi demokrasi dikarenakan semakin tingginya korupsi di pemerintahan Hosni Mubarak, maka efek tersebut menjadikan tingkat kesejahteraan rakyat dalam rezim Hosni Mubarak sangat rendah, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di Mesir sangat tinggi.

Pasca kejatuhan rezim Hosni Mubarak, pemerintahan Mesir digantikan oleh Muhammad Mursi sebagai presiden yang terpilih dalam pemilu dengan suara terbanyak. Dalam pemerintahan Mursi, Mesir juga masih digoyahkan oleh beberapa persoalan yang menjadikan Mesir masih dalam situasi kondisi politik yang belum stabil.

Terpilihnya Mursi sebagai presiden Mesir mengharuskan Mursi untuk menyelesaikan berbagai persoalan pasca jatuhnya rezim Hosni Mubarak. Dalam

Mursi masih banyak terdapat tantangan dan soal politik yang

terjadi hingga tahun 2012. Sehingga belum stabilnya situasi politik di Mesir menjadikan terjadinya kudeta militer terhadap Presiden Mursi pada 3 Juli 2013.

Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan mengenai apa faktor-faktor yang menyebabkan militer Mesir melakukan kudeta terhadap presiden Mursi yang terpilih melalui pemilu secara demokratis di Mesir. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kesulitan dan persoalan yang dihadapi dalam pemerintahan Mursi sampai terjadinya kudeta yang dilakukan militer terhadap Presiden Muhammad Mursi.

B. Latar Belakang Masalah

Mesir dalam pemerintahan Hosni Mubarak memberlakukan Undang-undang Keadaan Darurat sejak berakhirnya Perang Enam Hari pada tahun 1967, yang dimana UU ini memperbesar kekuasaan polisi dan menanggukkan hak konstitusional warga negara. Di bawah hukum ini pemerintah Mesir berhak menahan warga negaranya tanpa alasan jelas dan dalam jangka waktu tak terbatas.

Sepanjang pemerintahannya, Hosni Mubarak memberlakukan UU ini dengan alasan untuk melawan terorisme sekaligus mengontrol kelompok-kelompok islam fundamentalis, termasuk Ikhwanul Muslimin. Dengan UU ini, Mubarak dapat mencegah Ikhwanul Muslimin untuk dapat naik ke tampuk pemerintahan serta memperkecil pengaruh Ikhwanul Muslimin dan kelompok-

Selain tekanan di bidang politik terhadap kelompok oposisi, di bidang ekonomi juga Mubarak memimpin sebuah periode stabilitas dalam negeri dengan kediktatorannya, dan memonopoli ekonomi Mesir. Korupsi yang kian parah menyebabkan ketidak-stabilan di bidang ekonomi Mesir. Menurut data IMF, pertumbuhan PDB per kapita Mesir berjalan stagnan dari tahun 1989 hingga 2008, rata-rata PDB per kapita Mesir sedikit berubah, dari 2.155 dolar AS pada tahun 1989 menjadi 2.160 dolar AS pada tahun 2008. Ini merupakan yang terburuk di antara tiga belas negara di Timur Tengah, Afrika Utara, dan negara-negara Teluk.¹

Segala permasalahan yang menyebabkan ketidak-stabilan ekonomi di Mesir mengakibatkan harga bahan pangan yang terus meningkat, kemiskinan yang terus bertambah, dan lapangan pekerjaan yang kecil. Semua permasalahan diperparah dengan tekanan dari rezim terhadap rakyat dimana kebebasan berekspresi dikekang dengan sedemikian rupa, serta kepastian hukum yang buruk dalam pemerintahan Mubarak. Hal tersebut tentunya telah meledakkan kesabaran rakyat Mesir selama 30 tahun kepemimpinan Hosni Mubarak.

Rezim otoriter dan represif ini telah mengakumulasikan kebencian jutaan rakyat Mesir terhadap sang presiden mereka sendiri. Dengan semangat persatuan melawan penguasa yang otoriter dan diktator, sebagian besar warga Mesir menyatakan tekad untuk menumbangkan rezim Mubarak yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, sehingga mereka turun ke jalanan demi perjuangan

melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Itulah sebabnya, seluruh warga Mesir mulai bergabung dengan aksi massa dalam sebuah demonstrasi.

Kekecewaan ini kemudian didorong oleh kudeta rakyat Tunisia terhadap sang presidennya sendiri, Ben Ali. Terinspirasi terhadap fenomena di Tunisia itu, rakyat Mesir secara simultan merasa tergerak untuk menggulingkan pemerintahannya yang juga diktator seperti negara Tunisia. Rakyat Mesir-pun menjadi yakin dengan *people power* (kekuatan rakyat) dan mampu menggulingkan pemerintahan yang otoriter.²

Krisis yang berlangsung selama beberapa hari tanpa ada kepastian masa depan Mesir, membuat pemerintah AS turun tangan mengatasinya. Intervensi AS terhadap permasalahan di Mesir dikarenakan AS mempunyai kepentingan terhadap Mesir dan Timur Tengah. Mesir merupakan penghubung kepentingan AS di Timur Tengah, termasuk hubungan dengan Israel.

Mesir pada pemerintahan Hosni Mubarak mengambil kebijakan yang cenderung terlihat lebih pro-Israel dalam konflik Israel dengan Palestina, dan tidak lepas dari peran dan pengaruh AS terhadap pemerintah Mesir. Pada tanggal 28 Januari 2011, Presiden AS; Barak Obama meminta Mubarak untuk segera mengambil kebijakan kongkret guna merealisasikan reformasi politik dan menghentikan tindak kekerasan terhadap para demonstran. Dengan menjaga posisi Mubarak dan kepentingannya terhadap Mesir, kebijakan AS mengatas-namakan untuk demokrasi dan menjunjung HAM. Atas desakan AS, Mubarak kemudian

² Hminews. *Kronologi Revolusi Mesir*. <http://hminews.com/news/inilah-kronologi-18-hari-revolusi-mesir-mubarak-tumbang/>

mengambil langkah dengan membubarkan kabinetnya dan membentuk pemerintahan baru.³ Namun keputusan yang di ambil Mubarak tersebut tidak memberikan kepuasan terhadap rakyat, hingga kemudian masih melakukan demonstrasi kepada Mubarak.

Akhirnya, pada hari jumat tanggal 11 Februari 2011, secara mengejutkan Omar Suleiman mengumumkan pengunduran diri Mubarak dari kekuasaan yang telah dikuasainya selama 30 tahun di Mesir. Untuk mengontrol kekosongan dalam pemerintahan, seluruh wewenang Mubarak diserahkan kepada Dewan Militer Mesir. Dewan Tinggi Militer Mesir merilis deklarasi nomor tiga yang menyebutkan bahwa Dewan Militer akan menggantikan jabatan pemerintahan yang tidak didukung oleh rakyat Mesir.

Keberhasilan perjuangan rakyat Mesir yang melakukan demo selama 18 hari disambut kegembiraan rakyat Mesir yang di dalam maupun luar negeri. Ini adalah protes pertama di Mesir dengan skala besar sejak tahun 1970-an. Bentuk protes pada pemerintah tersebut, turut mengundang pemenang nobel dan mantan kepala Badan Tenaga Atom Internasional Mohamed El-Baradei untuk kembali ke Mesir dari Wina, ia menyatakan akan bersiap untuk memimpin dan bergabung dengan pemrotes. Demikian pula dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, lawan

³ Detiknews. *Mubarak Amankan Kepentingan AS*.
<http://www.detiknews.com/read/2011/02/04/051138/1559803/10/mubarak-tak-segera-mundur-karena-amankan-kepentingan-as>

politik dari rezim Mubarak yang selama ini secara resmi dilarang pemerintahan Mubarak ikut turut serta dalam hal ini.⁴

Pasca lengsernya Mubarak, Mesir memulai era transformasi politik dari yang serba “kaku” akibat kediktatoran yang mengekang segala bentuk kebebasan berubah menjadi era kebebasan modern yang didasari pada sistem demokrasi. Di Mesir, aktor yang mengendalikan proses transisi ini adalah militer. Dengan dalih stabilitas nasional, militer yang membentuk pemerintahan sementara menyiapkan jadwal pemilu yang dipercepat dan mengkaji ulang konstitusi, serta menyusun langkah-langkah rekonsiliasi.⁵

Akhirnya pemilihan umum dilaksanakan di Mesir, dan ini menjadi salah satu wujud terpenting dari adanya perubahan politik di negara seribu menara tersebut. Partisipasi masyarakat menunjukkan geliat untuk turut serta memberikan hak-hak suaranya, begitupun dengan para kandidat didalam pemilu tersebut yang bersaing secara damai.

Mencermati pemilihan umum tersebut, Mesir seolah seperti pada arena pertarungan. menurut Ikhwanul Kiram Mashuri pemilu digambarkan sebagai pertandingan islamis versus status quo. Menurutnya, calon presiden yang berkompetisi merepresentasikan kelompok-kelompok politik yang terpolarisasi ke

⁴ Femi Fernando Dan Syafri Harto, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hosni Mubarak Turun Dari Kursi Kepresidennya* (2011)

⁵ Berdikarionline. *Militer dan Transisi Demokrasi*.
<http://www.berdikarionline.com/opini/20130710/militer-dan-transisi-demokrasi.html#ixzz2Zw127A76>

macam-macam ideologi dan aspirasi politik sejak kejatuhan rezim Hosni Mubarak.⁶

Pertarungan islamis versus status quo lebih tepat ditujukan pada proses pemilihan umum di putaran kedua pada tanggal 16 dan 17 Juni 2012 yang mempertemukan antara Mursi dari Partai Kebebasan dan Keadilan dengan Ahmad Shafiq sebagai calon independen yang sebenarnya merupakan partai tunggangan Mubarak setelah keduanya lolos dalam pemilu putaran pertama dengan jumlah suara 25,3% untuk Muhammad Mursi dan 24,9% untuk Ahmad Shafiq.

Dalam pemilihan umum tersebut, Mursi sebagai calon dari kalangan Islamis mendapatkan tekanan dari pihak Militer (SCAF) yang merasa khawatir jika Mursi terpilih. Salah satu bentuk kekhawatiran tersebut adalah ketika militer menerbitkan suatu peraturan yang mempersempit kekuasaan presiden. Oleh sebab itu, Mursi seolah mendapatkan serangan dari dua arah, yakni dari Ahmad Shafiq sebagai lawan politiknya pada pemilu dan dari pihak Militer.

Pada pemilu kedua digelar, akhirnya membawa Mursi sebagai pemenang yang berhak menduduki kursi kepresidenan setelah meraih suara sebanyak 52,74%, sementara rival abadinya harus puas dengan perolehan suara 47,26%. Terpilihnya Mursi tidak serta-merta menenangkan situasi politik di negara ini. Transisi demokrasi masih berjalan alot dan keberpihakan politik menjadi kubu-kubu yang saling berlawanan. Ketika partai-partai islamis memenangkan pemilu parlemen, kubu sekuler, liberal dan yang sejalan dengan mereka mulai gusar.

⁶ *The New York Times*, "Islamic Militancy in Egypt's State of Emergency", *The New York Times*, 18 Juni 2012.

Mereka kemudian menakut-nakuti Koptik akan bahaya Islamisasi dan membumbuinya dengan wacana konflik sektarian, dan Mursi juga harus menjalin hubungan baik dengan militer. Sehingga Mursi harus dapat merangkul semua lapisan masyarakat Mesir khususnya loyalis Mubarak.

Mursi sebagai Presiden terpilih dengan suara mayoritas tentu memiliki mayoritas rakyat yang mendukungnya. Namun setahun kepemimpinan Mursi pasca transisi demokrasi, Mursi justru di kudeta oleh militer. Hal yang sangat tidak sesuai dengan negara Mesir yang sudah menganut sistem demokrasi. Tindakan yang diambil oleh militer Mesir tersebut sangat bertentangan dengan pernyataannya yang seolah pro demokrasi, dimana militer Mesir tidak akan terlibat dalam politik atau administrasi negara. militer Mesir akan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

Terpilihnya Mursi ini merupakan hasil dari proses demokrasi "pemilu", Seharusnya militer Mesir tidak sampai melegalkan melakukan kudeta terhadap Mursi. Bagaimanapun kudeta adalah suatu tindakan mencacati proses demokrasi dan sangat mengkhawatirkan.

Wajar jika kemudian rakyat menuntut hak legitimasi pasca kudeta militer terhadap presiden Mursi, karena mereka juga rakyat, memiliki kekuasaan yang sah secara hukum dan undang-undang negara demokrasi. Maka keputusan kudeta ini dengan sendirinya telah menciderai hukum dan melanggar hak bagi sebagian

yang lain. Tidak ada masalahnya kecuali membuka penangan terbuka sesama

Keberhasilan kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap presiden Muhammad Mursi ini menjadikan pemerintahan di Mesir tidak benar-benar dapat sepenuhnya dikuasai oleh Presiden terpilih yang berasal dari kalangan sipil. Meskipun presiden terpilih melalui pemilu secara demokratis tetapi peran dan pengaruh militer dalam pemerintahan sangat besar. Sehingga ketika presiden telah dikudeta maka selanjutnya pemerintahan di ambil alih oleh militer.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

“Apa faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan militer Mesir mengkudeta Presiden Muhammad Mursi?”

D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti memperhatikan ataupun melihat, Menurut Mochtar Mas'ood yang juga merupakan salah satu tokoh Hubungan Internasional di Indonesia dalam bukunya menerangkan bahwa teori adalah bentuk pernyataan yang

menghubungkan konsep-konsep secara logis dimana teori berupa sebuah kumpulan generalisasi yang didalamnya sehingga dapat menjelaskan suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan suatu fenomena tersebut secara ilmiah.⁷ Untuk dapat menjawab dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kudeta militer terhadap presiden Mursi adalah dengan menggunakan Teori Pretorian.

Teori Pretorian

Teori Pretorianisme-nya Nordlinger yang mengacu pada situasi dimana militer tampil sebagai aktor politik yang sangat dominan yang secara langsung menggunakan kekuasaan mereka. Militer Pretorian dapat diklasifikasikan sebagai *moderator, pengawal, dan penguasa*.⁸

Pretorian Pertama, *Pretorian Moderator* menggunakan hak veto atas keputusan pemerintah dan politik, tanpa menguasai pemerintah itu sendiri. Militer pretorian moderator mencoba menghindari diri untuk menguasai pemerintahan, mereka juga tidak begitu menonjol dibandingkan jenis pretorian lain. Mereka mencoba mempertahankan status Quo, menjaga keseimbangan diantara kelompok yang bersaing, melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam politik dalam kelembagaan, melarang setiap percobaan dalam mengalihkan hasil ekonomi dan menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.

⁷ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 186

⁸ David Nordlinger, *Militer dan Politik*, Bina Aksara, Jakarta, 1994, hal. 5-7

Pretorian Kedua adalah *Pretorian Pengawal* setelah mereka menggulingkan pemerintahan sipil, pada umumnya mereka sendiri akan memegang tampuk pemerintahan untuk periode dua tahun atau lebih. Pengawal pretorian berbuat demikian disebabkan karena tidak ada lagi pilihan lain karena tidak adanya satu golongan elit yang mampu mempertahankan status Quo politik dan ekonomi. Pengawal pretorian memberikan perhatian besar terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi dan menangkai inflasi yang melambung tinggi, anggaran belanja yang berlebihan dan neraca pembayaran yang defisit terjadi dibawah pemerintahan sipil.

Pretorian Ketiga adalah *Pretorian Penguasa*, tidak hanya menguasai pemerintahan tetapi juga mendominasi rezim tersebut. Tujuan dan ekonomi penguasa pretorian adalah sangat tinggi, hingga kadangkala mereka menganggap dirinya sebagai golongan modernis yang radikal atau revolusioner.

Dalam kasus Presiden Mesir Muhammad Mursi, ini termasuk pada golongan Pretorian Kedua, *Pretorian Pengawal* yaitu Meski pihak sipil memerintah tetapi kekuasaan mereka diawasi militer yang tidak akan menerima supremasi penuh pihak sipil. Dalam kasus ini Militer sangat mengontrol segala bentuk putusan dan kebijakan yang di ambil dan juga memantau bagaimana kondisi negara dalam kepemimpinannya. Dimana pada saat Mursi berkuasa, militer masih sangat kuat mendominasi di pemerintahan.

Menurut Eric A. Nordlinger kudeta bisa berhasil apabila terdapat tiga

ada beberapa hal khusus lainnya yang tidak terduga dapat menyebabkan suatu kudeta gagal. Ketiga syarat yang menentukan keberhasilan kudeta ialah :⁹

Pertama, keterlibatan aktif militer dalam menduduki pos-pos strategis pada saat sebelum terjadinya kudeta. Bataliyon infantri dan mobil lapis baja yang berada didalam kota atau yang berhampiran dengannya biasanya memulai kudeta. Dan para perwira militer yang menguasai pasukan harus ditempatkan ditempat strategis. Pada saat yang sama juga stasiun-stasiun, pemancar radio, televisi serta jaringan telepon mengatur posisi mereka dan mendapatkan dukungan untuk melakukan perlawanan. Prinsip setia pada pimpinan dan patuh pada atasan menyebabkan pasukan ini dapat menguasai keadaan. Tapi bukan berarti keterlibatan perwira senior diabaikan, tapi pemimpin yang menduduki pos-pos strategis adalah penting.

Kedua, anggota komplotan harus mempunyai jumlah pasukan yang memadai untuk menaklukkan penentang utama kudeta itu termasuk beberapa lokasi dan bangunan penting tertentu. Jumlah pasukan yang mereka kuasai haruslah cukup besar untuk bisa menggulingkan kekuasaan baik dari kalangan sipil maupun militer secara serempak. Dengan demikian semakin besar anggota semakin besar kesempatan untuk berhasil.

Ketiga, ketepatan koordinasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kudeta. Kudeta yang tidak bisa dijalankan secara tepat dan diselaraskan dengan baik umumnya akan menemui kegagalan.

⁹ Ibid. hal. 148-155

Selain syarat-syarat internal di atas, menurut Edward Luttwak keberhasilan kudeta juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain yaitu eksternal seperti berupa dukungan internasional. Bentuk dukungan internasional antara lain : dana dan politik.¹⁰

Sebulan setelah dekrit diterbitkan, pemerintahan Mursi menggelar referendum untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Tindakan ini pun dikritik karena dinilai sepihak dan terburu-buru. Konstitusi itu dinilai hanya mencerminkan kepentingan kelompok Mursi dan tidak dibuat dengan mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir. Sehingga ini merupakan salah satu penyebab terjadinya demonstrasi oleh pihak oposisi di mesir untuk menggulingkan mursi.

Disisi lain penggulingan Mursi mengenai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh mesir pasca gelombang reformasi terjadi 25 Januari 2011, dan Mursi dinilai gagal memenuhi janjinya selama kampanye presiden untuk mensejahterakan rakyat Mesir. Mursi gagal menaikkan upah dan taraf hidup rakyat Mesir. Sehingga persoalan ekonomi yang di hadapi oleh mesir semakin terpuruk.

¹⁰ Edward Luttwak, KUDETA: Taktik dan Politik, Penerbit Kompas, Yogyakarta, 2001, hal. 100

E. Hipotesa

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diruraikan diatas dan didukung oleh teori yang dipandang berguna untuk membantu menganalisa penulisan, maka dapat ditarik hipotesa sederhana dalam menjawab pertanyaan yang melatarbelakangi faktor penyebab kudeta militer terhadap Presiden Mursi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan berhasilnya kudeta militer di Mesir adalah: **Pertama**, Militer dapat menempati posisi yang strategis pada saat sebelum terjadinya kudeta, serta peran media dalam memberikan informasi. sehingga mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan.

Kedua, Besarnya jumlah pasukan dalam melakukan proses kudeta ini, baik dari kalangan sipil maupun militer yang berperan didalamnya. Sehingga semakin banyaknya pasukan yang terlibat akan semakin menentukan keberhasilan kudeta yang dilakukan

Ketiga, ketepatan koordinasi yang dilakukan oleh militer dalam menguasai pemerintahan dan penempatan pasukan-pasukannya merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kudeta. Sehingga semua pasukan dapat menguasai tempat-tempat yang strategis dengan koordinasi yang tepat.

Sedangkan **faktor eksternal** yang menyebabkan berhasilnya terjadinya kudeta militer terhadap presiden Mursi adalah adanya peran dan dukungan

Mursi. Faktor eksternal tersebut adalah bantuan dana yang didapatkan oleh militer Mesir serta dukungan internasional dari berbagai negara melalui sikap politik terhadap kudeta militer di Mesir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitiannya adalah deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan bagaimana suatu hal terjadi atau memaparkan data-data yang ada. Data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, disesuaikan dengan konsep-konsep yang dikenal dalam hubungan internasional. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Pengumpulan data yang dibutuhkan bagi penelitian ini dilakukan dengan melalui teknik penelitian kepustakaan (library research)¹¹. Penelitian menggunakan data sekunder, yaitu merupakan hasil-hasil penelitian orang lain dan berbentuk tulisan yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, media cetak, dan media lainnya serta laporan dari berbagai sumber yang relevan bagi penelitian ini. Data-data yang diperoleh untuk penulisan ini kemudian diakumulasikan dan dikomparasi sehingga dapat diperoleh generalisasi terhadap data-data tersebut. Serta data-data sekunder yang menjadi dokumen didalam penulisan ini diperoleh perpustakaan umum, situs internet, maupun koleksi pribadi.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dan penentuan batas-batas ruang lingkup penelitian ini nantinya dapat lebih terfokus pada masalah spesifik yang mampu berpengaruh pada analisis masalah. Jangkauan penelitian ini dimulai dari Jatuhnya rezim Hosni Mubarak pada tanggal 11 Februari 2011 sebagai awal transisi demokrasi di Mesir sampai dengan kudeta militer dan lengsernya Presiden Mursi pada tanggal 3 Juli 2013.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari apa yang diuraikan dalam pendahuluan, maka disajikan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana setiap bab membahas hal yang berbeda-beda untuk memudahkan pembaca memahami pembahasan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan tentang bagaimana dinamika pemerintahan Mesir pada era- Hosni Mubarak

Bab III, berisikan tentang bagaimana transisi demokrasi Mesir dan kudeta

Bab IV, berisikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kudeta militer terhadap Presiden Muhammad Mursi

Bab V, penulis nantinya akan menyajikan kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan pada data-data dan analisis yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya